



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
Jl. Yos Sudarso No.92 Wagom. Fakfak - Papua Barat
Telp / Fax : (0956) 22413
Website : www.pn-fakfak.go.id
Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Fakfak Klas II dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Fakfak Klas II dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2021.

Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan Tahun 2021 ini masih belum sempurna dari tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Fakfak Klas II Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas kerja jajaran Pengadilan Negeri Fakfak Klas II kedepan.

Fakfak, 10 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.



TRI MARGONO, S.H.
NIP: 19760211 200212 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB. I Pendahuluan	5
BAB. II Penyelesaian Perkara	10
A. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Fakfak	10
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	11
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	11
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	11
B. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Fakfak	11
- Jumlah sisa perkara yang diputus	12
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	12
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	12
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	13
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	13
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	14
- Posbakum (Satker yang mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran)	14
- Sidang keliling / pelayanan terpadu	16
- Perkara Prodeo	17
BAB III. Sumber Daya Manusia	18
- Mutasi	20
- Promosi	21
- Pensiun	22

-	Diklat	22
BAB IV.	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	23
A.	Pengelolaan Keuangan	23
B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	27
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	31
-	Implementasi e-Court di pada Pengadilan Negeri Fakfak	32
-	Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Fakfak	35
BAB V.	Peningkatan Pelayanan Publik	38
-	Akreditasi Penjaminan Publik	38
-	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	41
-	Inovasi Pelayanan Publik	48
BAB VI.	Pengawasan	55
A.	Internal	55
B.	Evaluasi	61
BAB VII.	Penutup	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Rekomendasi	63

1

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa sasaran Bidang Hukum adalah terwujudnya sistem Hukum Nasional yang menjamin tegaknya supremasi Hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah guna menciptakan GOOD GOVERNMENT dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan sangat urgent untuk dikedepankan sehingga praktek peradilan dan penampilan peradilan akan semakin tertib, handal, jujur, berwibawa dan bermartabat dimata publik.

Kekuasaan Badan Peradilan adalah Kekuasaan Negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya. Diantaranya adalah Badan Peradilan Umum yang pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan salah satu bagian dari Pengadilan Tinggi Jayapura yang terbentuk berdasarkan Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 12 Tahun 1965 tanggal 22 Mei 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1963. Dahulu bernama Pengadilan Tinggi Irian Barat, berkedudukan di Hollandia (Jayapura) yang membawahi seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Irian Barat. Seiring perkembangan waktu nama Pengadilan Tinggi Irian Barat tersebut terakhir berubah dengan Pengadilan Tinggi Jayapura yang kini meliputi dua Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun Pengadilan Negeri Fakfak berada dibagian Provinsi Papua Barat dan berkedudukan di Jalan Yos Sudarso nomor 92 Fakfak Papua Barat. Dengan Wilayah Hukum mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak.

Seiring dengan pemekaran Provinsi Papua Barat sesuai Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat maka Pengadilan Negeri Fakfak harus segera melakukan Kebijakan Strategis, Peningkatan Kinerja, Pembenahan Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Anggaran maupun Pembangunan Infrastruktur pada Pengadilan Negeri Fakfak mengingat secara geografis sangat berbeda dengan daerah lain sehingga harus didukung dengan sarana transportasi udara yang sangat Dominan digunakan yang mengakibatkan biaya tinggi.

B. VISI DAN MISI.

1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Fakfak adalah :

“Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung”.

2. MISI

PENGADILAN NEGERI FAKFAK mengemban Misi :

- MENJAGA INTEGRITAS DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.
- MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.
- MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.
- MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.

3. MOTTO

Pengadilan Negeri Fakfak Klas II memiliki Motto:

“ BISA TERBINA”.

BERWIBAWA INTEGRITAS SANTUN ADIL TERTIB BERSIH
INOVATIF AMANAH

4. KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Fakfak adalah pernyataan komitmen pimpinan untuk memastikan bahwa proses implementasi sistem manajemen mutu di Pengadilan Negeri Fakfak sesuai dengan sasaran mutu organisasi, serta memenuhi persyaratan mutu dan berupaya secara berkelanjutan memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu.

Kebijakan manajemen Mutu Pengadilan Negeri Fakfak :

1. Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
2. Memberikan Kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan negeri Fakfak.
5. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengadilan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

C. RENCANA STRATEGIS.

Sebagai implikasi dari Visi dan Misi tersebut di atas, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang bermuatan kebijakan strategis , kebijaksanaan, program kerja dan kegiatan tahunan yang disusun dan ditata

secara sistimatis, terarah dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan faktor internal maupun eksternal organisasi yang nantinya sebagai acuan dan pedoman kerja maupun sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan – kegiatan yang sudah terlaksana guna penyempurnaan program selanjutnya agar tepat guna dan tepat sasaran.

Sesuai dengan tuntutan publik terkait dengan Supremasi hukum maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Fakfak, perlu adanya suatu Rencana Strategis yang baik sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita – cita hukum yang merupakan tuntutan masyarakat dimaksud terkait dengan kemandirian hukum dan keadilan , penegakan supremasi hukum , proses peradilan yang cepat , sederhana dan dengan biaya ringan. Dimana Rencana Strategi ini, hal yang sifatnya fundamental dan perlu mendapat perhatian adalah perkembangan Hukum dan kondisi masyarakat Fakfak.

Kondisi internal dari Pengadilan Negeri Fakfak maupun kondisi perkembangan Hukum dan masyarakat secara nasional. Selain itu, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak berisikan kajian kegiatan secara sistematik yang terakumulasi dalam tahapan kegiatan tahunan yang terinci dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pengadilan meliputi:

A. Tujuan Pengadilan Negeri Fakfak

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan negeri Fakfak Klas II adalah sebagai berikut:

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum)
2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan publik para pencari keadilan bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang Profesional.

B. Sasaran Strategis

Adapun Penjabaran dari tujuan terukur, yaitu semua yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*Acces to Justice*).
6. Meningkatnya kualitas Pengawasan.
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Fakfak.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Fakfak.

2 BAB II PENYELESAIAN PERKARA

A.Keadaan Perkara

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Negeri Fakfak yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka selama tahun 2021 baik Perkara Perdata maupun Perkara Pidana yang diproses di Pengadilan Negeri Fakfak dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Keadaan Perkara Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak

❖ Perkara pidana tahun 2021

No	Jenis Perkara	Perkara Pidana			Ket
		Masuk	Putus	Sisa	
1.	Perkara Pidana Biasa	77	73	4	
2.	Perkara Pidana Anak	-	-	-	
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	3	3	-	
4.	Pra Peradilan (Prapid)	1	1	-	
5.	Penyitaan	62	-	-	
6.	Pengeledahan	4	-	-	

❖ Perkara perdata tahun 2021

No	Jenis Perkara	Perkara Perdata				Ket
		Masuk	Putus	Cabut	Sisa	
1.	Perkara Perdata Gugatan	15	10	1	5	
2.	Perkara Perdata Permohonan	21	21	-	-	
3.	Perkara Gugatan Sederhana	1	1	-	-	
4.	Gugatan /Bantahan	-	-	-	-	

2. Perkara tingkat Banding

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding
1.	Perkara tingkat Banding	3	7	10	10

3. Perkara tingkat Kasasi

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1.	Perkara tingkat Kasasi	-	2	2	2

4. Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum
1.	Perkara tingkat Peninjauan Kembali	-	-	-	-

B. Penyelesaian Perkara**1. Jumlah sisa perkara yang diputus**

Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima dan memutus perkara dalam wilayah yurisdiksinya.

a. Perkara Pidana**- Rekapitulasi keadaan perkara pidana tahun 2021**

No	Jenis Perkara	Perkara Pidana				Ket
		Sisa 2020	Masuk	Putus	Sisa	
1.	Perkara Pidana Biasa	-	77	73	4	
2.	Perkara Pidana Anak	-	-	-	-	
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	-	3	3	-	
4.	Pra Peradilan (Prapid)	-	1	1	-	
5.	Penyitaan	-	62	-	-	

6.	Pengeledahan	-	4	-	-	
----	--------------	---	---	---	---	--

b. Perkara perdata

- Rekapitulasi perkara perdata tahun 2021

No	Jenis Perkara	Perkara Pidana					Ket
		Sisa 2020	Masuk	Putus	Cabut	Sisa	
1.	Perkara Perdata Gugatan	4	15	14	1	5	
2.	Perkara Perdata Permohonan	-	21	21	-	-	
3.	Perkara Gugatan Sederhana	-	1	1	-	-	
4.	Gugatan /Bantahan	-	-	-	-	-	

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2021	Perkara yang diputus tepat Waktu Tahun 2021
1.	Perkara Pidana	77	73
2.	Perkara Perdata	37	32

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
1.	Putusan Perkara:				
	- Banding	3	66	69	69
	- Kasasi	-	71	71	71
	- PK	-	73	73	73

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2021	Jumlah Perkara yang berhasil Mediasi Tahun 2021
1.	Perkara Perdata	1	1

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2021	Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui diversi Tahun 2021
1.	Perkara Pidana	-	-

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)**1. Posbakum**

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum. Dalam tahun Anggaran 2021, dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Fakfak sebesar **Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk setiap bulannya dengan 2 jam kerja, dengan penyerapan anggaran mencapai **100%**. Pada awal tahun 2021 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan/ MOU dari pihak Pengadilan Negeri Fakfak dan Pihak Advokad untuk mendukung dan mensukseskan layanan tersebut.

Dan sebagai inovasi, Pengadilan Negeri Fakfak menampilkan Layanan Pos Bantuan Hukum Online yang dapat diakses melalui website pn-fakfak.go.id, yang merupakan hasil Aktualisasi dan Habitulasi dari Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan Layanan Bantuan Hukum Online pada Website Pengadilan Negeri Fakfak

Untuk mendukung kegiatan Pos Bantuan Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak telah menyediakan akses informasi berupa selebaran/flyer, banner serta jadwal dan foto dari Petugas piket Pos Bantuan Hukum untuk menginformasikan



tentang fasilitas tersebut kepada para pencari keadilan dan pengguna Layanan Publik pada Pengadilan Negeri Fakfak.

2. Sidang keliling / Pelayanan Terpadu

Sesuai dengan Misi Pengadilan Negeri Fakfak yaitu memberikan Pelayanan Hukum yang inovatif dan berkeadilan kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Fakfak pada Tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan Sidang Keliling pelayanan terpadu, dikarenakan alasan keselamatan dan situasi pandemi *COVID-19*.

3. Perkara prodeo

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapat alokasi Anggaran untuk Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

3

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan sehingga perlu dipacu dan didorong lewat pendidikan dan pelatihan secara simultan. Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2021 sebanyak: 20 (dua puluh) orang pegawai dan 11 (sebelas) tenaga honorer.

Tabel III.1. Data Pegawai

No	TENAGA TEKNIS	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Ketua : Tri Margono, S.H.	IV/a	
2	Wakil Ketua : Dedy Heriyanto, S.H.	IV/a	
3	Hakim : 1. Reynold S.E.M.P Nababan, S.H. 2. Iranda Careca Anindityo, S.H. 3. Ganjar Prima Anggara, S.H. 4. Ivan Bhakti Yudistira, S.H.	III/a III/a III/a III/a	
4	Panitera Sandar Sitanggung, S.H.	III/d	
5	Panitera Muda Perdata Adolfina Durian, S.Kom., S.H. Yulian Riski Ananda, A.Md.A.B (CPNS)	III/c III/a	
6	Panitera Muda Pidana Johanis Siahaya, S.H. Irianto Tanggahma, S.H (CPNS)	III/c III/a	
7	Panitera Muda Hukum Salmuna	III/b	
8	Panitera Pengganti -	-	-
9	Jurusita 1. Ismet Wairoy, S.H.	III/a	Diperbantukan di Bagian Pidana

	2. Randy Marchell Sohilat	II/c	Diperbantukan di Bagian Perdata
No	TENAGA NON TEKNIS	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Sekretaris : Sukarman, S.H.I.	(III/d)	
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : La Idu Staf: 1. Engelbertha Turot, S.H.	(III/b) (III/a)	
3	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.	(III/c)	
4	Kasubag Umum dan Keuangan : Rizal Asbar, S.H. Staf : 1. Johanis Marthinus Rahadat	(III/b) (II/a)	Diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran

Tabel III.2. Data Tenaga Honorer

No	TENAGA HONORER	T. M. T.	KETERANGAN
1.	Thomas Wiratraur, S.H.	02 – 01 – 2007 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum & Keuangan.
2.	Asri Wali, S.H.I.	02 – 01 – 2008 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum & Keuangan.
3.	Oktoviana. T. Watto, S.H	03 – 03 – 2011 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Kepegawaian.
4.	La Wandy	11 – 06 – 2012 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Pidana
5.	Yeni Anggraini, S.Sos.	12 – 06 – 2012 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Perdata.
6.	Robertho. R. Tawirasaru, S.H.	12 – 03 - 2014 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Pidana.
7.	Ratna Keley, A.Md.	05 – 01 - 2015 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum & Keuangan.
8.	Rika Mustika Sari, S.H.	01 – 10 - 2015 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum & Keuangan.
9.	Agung Irvan Bili, S.Kom	01 – 05 – 2017 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian

			Perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H	29 – 03 – 2021 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Hukum
11.	Juniar Patimbang, A.Md	28 – 06 – 2021 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Hukum

Tabel III.3. Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Kebutuhan	Yang Ada	Kekurangan
1.	Staf Kepaniteraan Pidana	4	0	4
2.	Staf Kepaniteraan Perdata	4	0	4
3.	Staf Kepaniteraan Hukum	4	0	4
4.	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	4	0	4
5.	Staf Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana	2	1	1
6.	Staf Subbag Umum dan Keuangan	4	1	3
7.	Fungsional Arsiparis	2	0	2
8.	Fungsional Pustakawan	2	0	2
9.	Fungsional Pranata komputer	2	0	2
10.	Fungsional Bendahara	2	0	2

1. Mutasi

Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun atas pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk memberikan pengalaman regional maupun Nasional.

Tabel III.4. Mutasi Masuk Tahun 2021

No	Nama	Jabatan Baru	Jabatan Lama	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
-	-	-	-	-	-

Tabel III.5. Mutasi Keluar Tahun 2021

No	Nama	Jabatan Baru	Jabatan Lama	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1	ISMAIL RUMODAR, S.Hi	Jurusita Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak	1353/DJU/SK/KP04.5/5/2021	16/09/2013

2. Promosi

Selain itu mutasi diartikan pula sebagai promosi yang dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kecakapan kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengalaman, kejujuran serta syarat-syarat objektif lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS).

Tabel III.6. Promosi Naik Pangkat

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Pangkat/Golongan Baru	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1	RIZAL ASBAR, S.H.	III/b	833/SEK/Kp.I/SK/X/2019	22/11/2019

Tabel III.7. Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan Baru	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	REYNOLD S.E.M.P NABABAN, S.H	III/a	540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020	01/07/2020
2	IRANDA CARECA ANINDITYO, S.H	III/a	540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020	01/07/2020
3	GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H	III/a	540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020	01/07/2020
	IVAN BHAKTI YUDISTIRA, S.H	III/a	1664/DJU/SK/KP04.5/11/2020	26/01/2021

3. Pensiun

Dalam Tahun 2021 ada Aparatur yang memasuki masa Purnabakti/Pensiun dari Kesekretariatan.

No	Nama/NIP	Pangkat	Jabatan	Nomor SK
1	SUKARMAN, S.Hi 19631231 199103 1 045	Penata Muda III/d	Sekretaris	(Masih menunggu)

4 Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Selama tahun 2021 pegawai yang mengikuti Diklat Pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai Berikut:

Tabel III.8. Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Swiss-Belhotel Sorong	Tri Margono, SH
2	Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Swiss-Belhotel Sorong	Iranda Careca Anindityo, SH
3	Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Swiss-Belhotel Sorong	Reynold S.E.M.P Nababan, SH
4	Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Swiss-Belhotel Sorong	Sandar Sitanggang, SH
5	Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Swiss-Belhotel Sorong	Johanis Siahaya, SH
6	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Gelombang III	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting Tahap I 26 Juli s/d 3 Agustus 2021 Tahap II 4 s/d 24 Agustus 2021	Dedy Heriyanto, SH
7	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Narkotika	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting Tahap I 13 s/d 17 September 2021 Tahap II 20 September s/d 1 Oktober 2021	Tri Margono, SH

8	Manajemen Aset Gelombang IV	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting 2 s/d 6 Agustus 2021	Yurice J.C Rembet, ST
9	Manajemen Laporan Kinerja Gelombang II	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting 28 Juni s/d 2 Juli 2021	Yurice J.C Rembet, ST
10	Kick Off Champion Meeting	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel 28 Juni s/d 2 Juli 2021	Ganjar Prima Anggara, SH
11	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Tahap I Via Zoom Meeting 19 Mei s.d 2 Juni 2021 Tahap II Via Zoom Meeting 3 s/d 21 Juni 2021 Tahap III Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Bogor	Tri Margono, SH
12	Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Gelombang II	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Tahap I Via Zoom Meeting 26 April s/d 5 Mei 2021 Tahap II 19 Mei s/d 10 Juni 2021 Tahap III 11 s/d 16 Juni 2021	Dedy Heriyanto, SH
13	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting Tahap I A1 s/d 8 Februari 2021 Tahap II 9 s/d 19 Februari 2021	Ganjar Prima Anggara, SH
14	Pelatihan Online Basic User Interface Design	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting 15 s/d 19 Februari 2021	Yurice J.C Rembet, ST
15	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXIII	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI 24 November s/d 2 Desember 2021	Dedy Heriyanto, SH
16	Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary)	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting 18 s.d 19 Februari 2021	Ganjar Prima Anggara, SH
17	Pelatihan Online Efektivitas Pribadi	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting 15 s.d 17 Februari 2021	Iranda Careca Anindityo, SH
18	Pelatihan Online Ilmu Journalistik	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting 15 s.d 18 Februari 2021	Tri Margono, SH
19	Pelatihan Online Ilmu Journalistik	Badan Litbang Hukum dan Peradilan	Via Zoom Meeting 15 s.d 18 Februari 2021	Yurice J.C Rembet, ST

4

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara umum, pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Fakfak mengelola 2 (Dua) DIPA, yakni:

Pertama DIPA yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Mendapat alokasi anggaran Belanja Pegawai dan belanja Barang dan Belanja modal diawal tahun 2021 dengan total anggaran sebesar **Rp. 4.872.957.000,-** (Empat Milliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan diakhir tahun 2021 menjadi **Rp. 4.889.207.000,-** (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Rupiah).

Dalam kurun waktu tahun 2021 telah melakukan 5 (lima) kali revisi yaitu:

1. Revisi Pertama tanggal 12 Juli 2021, revisi POK dengan persetujuan Eselon I;
2. Revisi Kedua tanggal 06 Oktober 2021, revisi POK dengan persetujuan Eselon I;
3. Revisi Ketiga tanggal 4 November 2021, penambahan belanja pakaian dinas (revisi antar satker)
4. Revisi Keempat tanggal 10 Desember 2021, Revisi pagu minus dalam hal anggaran tetap;

Kedua, DIPA yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah agung dengan dapat alokasi anggaran Belanja Barang dengan total anggaran sebesar **Rp 31.200.000,-** (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dalam kurun waktu tahun 2021 telah melakukan 1 (satu) kali revisi yaitu:

1. Revisi Pertama tanggal 04 Oktober 2021, revisi anggaran dalam hal pagu tetap;

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pengelolaan Keuangan Pada DIPA 01 untuk Tahun 2021 dari Pagu sebesar **Rp. 4.889.207.000,-** (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Rupiah), dengan realisasi penyerapan Anggaran **Rp. 4.255.003.736,-** dengan persentase sebesar **87,12%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2021 telah melakukan 4 (Empat) kali revisi dari Kanwil DJPB dan DJA.

Pengelolaan dan penyerapan/ realisasi pada masing – masing akun belanja dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2021 Pagu awal sebesar **Rp.3.359.335.000,-** Penyerapan belanja Pegawai sampai akhir 2021 adalah sebesar Rp. 2.746.741.198 dengan persentase sebesar **81.76%**.

Tabel IV.1. Realisasi Belanja Pegawai

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.076.017.000	926.510.580	86.11	149.506.420
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000	12.822	35.62	23.178
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	82.602.000	67.635.340	81.88	14.966.660
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	28.127.000	18.260.976	64.92	9.866.024
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	48.140.000	28.140.000	58.45	20.000.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.200.000.000	1.001.200.000	83.43	198.800.000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	174.298.000	142.546.310	81.78	31.751.690
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.030.000	57.132.170	78.23	15.897.830
511129	Belanja Uang Makan PNS	230.540.000	167.893.000	72.83	62.647.000
511138	Belanja tunjangan Khusus Papua PNS	209.320.000	149.770.000	71.55	59.550.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21.255.000	10.040.000	47.30	11.185.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	216.000.000	177.600.000	82.22	38.40.000
Jumlah		3.359.335.000	2.746.741.198	81.76	612.593.802

b. Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2021 sebesar Rp 4.851.707.000,- yang merupakan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Realisasi penyerapan belanja barang sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar **87.02%**.

Tabel IV.2. Realisasi Belanja Barang Non Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	5.000.000	5.000.000	100	0
JUMLAH		5.000.000	5.000.000	100	0

Tabel IV.3. Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	552.866.000	546.487.721	98.85	6.378.279
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.791.000	19.791.000	100	20
521115	Belanja Honor Terkait Oprasioanal Satuan Kerja	52.800.000	52.800.000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	63.912.000	62.393.500	97.62	1.518.500
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	6.600.000	6.559.000	99.38	41.000
521811	Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	94.829.000	94.828.773	100	227
522111	Beban Langganan listrik	108.000.000	94.434.000	87.44	13.566.000
522112	Beban Langganan Telpon	1.161.000	1.704.020	92.51	86.980
522113	Beban Langganan Air	12.000.000	11.994.000	99.95	6.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	360.000	360.000	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	228.150.000	228.150.000	100	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Lainnya	66.483.000	66.483.000	100	456
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	110.880.000	110.880.000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	164.740.000	164.728.000	99.99	12.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000	4.800.000	100	0
JUMLAH		1.487.372.000	1.740.162.538	98.84	21.609.462

c. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp 37.500.000,- yang merupakan pengadaan Komputer/ P.C. untuk Panitera dalam mendukung SIPP. Realisasi penyerapan belanja modal sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar **100%**.

Tabel IV.4. Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	100	0
JUMLAH		37.500.000	37.500.000	100	0

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 adalah Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dan dialokasikan untuk keperluan Belanja Barang selama setahun yang mendukung kinerja peradilan dan aparatur yang bekerja didalamnya dalam bidang perkara. Adapun tahun 2021 dialokasikan dana dengan total anggaran sebesar **Rp 75.496.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**. Dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp 74.502.300,-** Dan persentase penyerapan sebesar **98,68%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2021 telah melakukan 1 (satu) kali revisi dari Kanwil DJPB.

Rincian Pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2021 untuk Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5. Realisasi Belanja DIPA 03

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
Pos Pelayanan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100	0
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan banding yang tepat waktu					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.900.000	4.361.000	89,00	539.000

521211	Belanja Bahan	16.850.000	16.840.000	99.94	10.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.646.000	10.646.000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000	11.455.300	96.26	444.700
JUMLAH		43.396.000	43.302.300		455.239

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Fakfak merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Fakfak selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sorong secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Negeri Fakfak melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai pagu anggaran sebesar **Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh juta Lima Ratus**

Ribu Rupiah). Dari pagu tersebut, realisasi pengadaan sarana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.6 Daftar Pengadaan Sarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa computer/ P.C.	Rp. 37.500.000,-
Total Nilai		Rp. 37.500.000,-,-

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

a. Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Tanah dan Gedung Kantor						
1.	Tanah Bangunan Gedung Kantor	1	√			
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	√			
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			
4.	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	√			
5.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	√			
6.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	√			
7.	Bangunan Penampung Air Baku	1	√			
8.	Pagar Permanen	1	√			

b. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Rumah Dinas						
1.	Rumah Dinas Ketua	1		√		Aset Pemda
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			Renovasi Tahun 2013
3.	Rumah Dinas Hakim	7	3	-	4	Butuh Di renovasi
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			Renovasi Tahun 2013
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	Nihil

c. Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Inova	2007	√			
2	Kijang Grend Toyota	1991			√	
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda	2002		√		

d. Sarana dan Prasarana Lainnya

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	*KETERANGAN
I	Sarana/ Prasarana Ruang		
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil	1	Baik
3.	Ruang Hakim	1	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6.	Ruang Register	1	Baik
7.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Baik
8.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Baik
9.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik
10.	Ruang Juru Sita	1	Baik
11.	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
12.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
13.	Ruang Umum dan Keuangan	1	Baik
14.	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
15.	Ruang Perencanaan Tehnik Informasi dan Pelaporan	1	Baik
16.	Ruang Sidang Utama (Cendrawasih)	1	Baik
17.	Ruang Sidang Kedua (Kasuari)	1	Baik
18.	Ruang Sidang Anak	1	Baik
19.	Ruang Tahanan (Pria/ Wanita)	2	Baik
20.	Ruang Mediasi	1	Baik
21.	Ruang Arsip	1	Baik
22.	Ruang Laktasi dan kesehatan	1	Baik
23.	Ruang Mushola	1	Baik
24.	Ruang Humas	1	Baik
25.	Ruang Jaksa	1	Baik
26.	Ruang Posbakum	1	Baik
27.	Ruang Pantri	2	Baik
28.	Ruang Bendahara	1	Baik
29.	Ruang Server	1	Baik
30.	Ruang Penyimpanan Dokumen	1	Baik
31.	Ruang Kasir Perdata	1	Baik
32.	Ruang Bapas, Pengacara dan Pekerja Sosial	1	Baik
33.	Ruang WC Umum	4	Baik
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Meja reseptionis	1	Baik

2.	Scanner	2	Baik
3.	server	1	Baik
4.	Mesin Ketik portable	27	Rusak ringan 2 rusak berat 25
5.	Mesin Hitung Listrik	1	Rusak Berat
6.	Portabel Genset	1	Baik
7.	Lemari Penyimpan	7	1 rusak berat ; 6 Baik
8.	Mesin Stensil	5	5 Rusak berat
9.	Lemari Besi/ Metal	28	22 Rusak Berat; 6 baik
10.	Lemari Kayu	24	12 Rusak Ringan; 12 Baik
11.	Rak Kayu	15	15 baik
12.	Filling Cabinet Besi	14	3 rusak berat; 5 baik, 6 Rusak Ringan
13.	Brankas	5	1 Rusak Ringan; 4 Baik
14.	Lemari Display	1	Baik
15.	Lemari Katalog	1	Baik
16.	Papan Visual	21	8 Rusak Ringan; 13 Baik
17.	Buffet	2	Baik
18.	Hand Metal Detector	1	Baik
19.	Perkakas Kantor Lainnya	1	Baik
20.	Meja Kerja Besi/Metal	57	20 Rusak Ringan ,22 Baik, 15 Rusak Berat
21.	Meja Kerja Kayu	96	9 rusak berat; 87 Baik
22.	Kursi Besi/metal	226	19 Rusak Ringan; 161 Baik, 46 Rusak Berat
23.	Kursi Kayu	23	19 Baik ,4 Rusak Berat
24.	Sice	19	1 Rusak Berat; 18 Baik
25.	Bangku Panjang Besi/metal	36	36 Baik
26.	Bangku Panjang Kayu	50	22 Rusak Ringan, 28 Baik
27.	Meja Rapat	5	Baik
28.	Meja Komputer	4	Baik
29.	Sketsel (Pagar Ruang Sidang)	1	Baik
30.	Kursi Fiber Glas/plastik	4	Baik
31.	Pot Bunga	9	9 rusak berat
32.	Jam Mekanis	10	5 Rusak Berat, 5 Rusak Ringan
33.	Mesin Pemotong Rumput	2	2 Rusak Berat
34.	lemari Es	2	2 Rusak Berat
35.	A.c.split	17	17 baik
36.	Kipas Angin	36	2 Baik, 34 Rusak Berat
37.	Televisi	5	Baik
38.	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
39.	Tiang Bendera	6	Baik
40.	Kaca Hias	1	Baik
41.	Dispenser	2	Rusak berat
42.	Palu Sidang	2	Baik
43.	Gordyin/Kray	66	66 rusak berat
44.	Dvd Player	1	Rusak Berat
45.	Compact Disc player (peralatan Studio Audio)	1	Baik
46.	Professional Sound system	1	Baik
47.	Telephone (pabx)	3	1 Baik, 2 Rusak Berat
48.	pesawat Telephone	6	6 Rusak Berat
49.	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	1 Rusak Berat
50.	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	1 Baik
51.	P.c Unit	24	18 Baik, 6 Rusak Berat
52.	Lap Top	10	8 Baik, 2 Rusak Berat
53.	Note Book	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
54.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	10 Baik
55.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
56.	Portable Air Conditioning (ac)	3	Baik
57.	Instalasi ac	4	4 Rusak Berat

58.	Monografi	15	Baik
59.	Piala	8	Rusak Berat
60.	Piagam	1	Rusak Berat
61	Mesin Hitung manual	1	Rusak Berat
62	Papan Pengumuman	1	Baik
63	Stabilisator	2	Baik
64	Lambang Instansi	1	Baik
65	Kursi Dorong	3	Baik
66	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik
67	Router	1	Baik
68	Air Conditioning (ac)	2	Baik

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.943 m² senilai Rp. 250.892.000,- (Dua ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (Rumah Dinas) 11 Unit , 747 m² Senilai Rp. 66.483.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 169.112.000 (Seratus enam puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Negeri Fakfak yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke KPKNL untuk dilakukan penghapusan.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Fakfak bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Negeri Fakfak telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.pn-fakfak.go.id. Dalam website ini Pengadilan Negeri Fakfak menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Fakfak baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya. Adapun perkembangan dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan peradilan selanjutnya adalah adanya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan aplikasi e-court.

1. Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Fakfak

E-court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online . Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut: Pendaftaran Perkara Online, Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM), Dokumen Persidangan, Pemanggilan Elektronik (e-Summons), Link E-Court Mahkamah Agung RI e-court

Layanan e-court ini merupakan layanan baru yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung dan diterapkan diseluruh jajaran pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Fakfak. Dalam pengimplemetasiannya layanan e-court pada Pengadilan Negeri Fakfak menggunakan perangkat teknologi informasi dan alat

pengolah data untuk mendukung pengoperasian layanan e-court di Pengadilan Negeri Fakfak yaitu:

Tabel IV.7 Perangkat pendukung e-court

PERANGKAT PENDUKUNG E-COURT			
Alat	Spesifikasi	Jumlah	
P.C. Unit	HP AIO PROONE 600 G5 (I5, 4GB,1 TB, WIN10,21.5IN)	4	Unit
UPS P.C. Unit	APC Back-UPS BX 1400U-MS	4	Unit
Server	Fujitsu TX1330M4 (Intel Xeon E-2134,32GB, 2x, 1TB)	1	Unit
Rak Server		1	Unit
E-court corner	Vestouch InteractiveAndroid Kiosk 21,5 inch	1	Unit

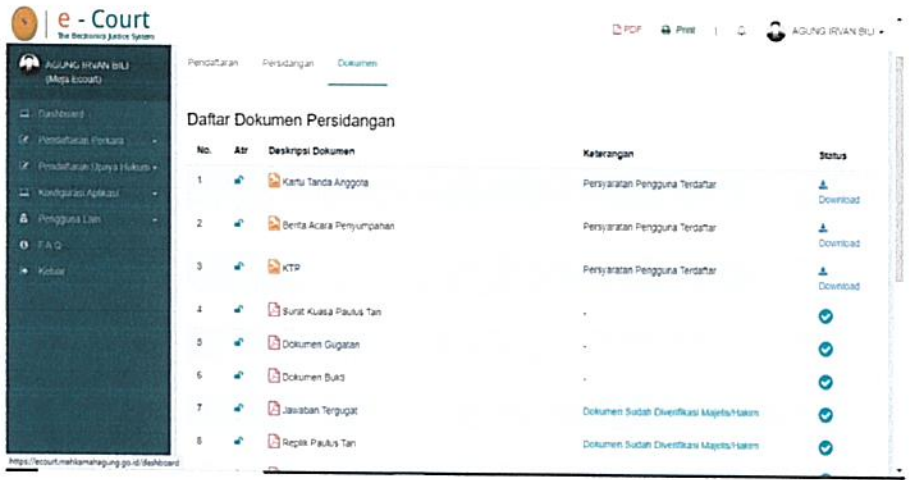
Tahun 2021, Pengadilan Negeri Fakfak menerima 36 pengguna Layanan e-court, berikut Implementasi Layanan e-court yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Fakfak:

DAFTAR PERKARA ECOURT		
No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Gugatan	15
2.	Gugatan Sederhana	1
3.	Permohonan	20

Tabel Perkara Pengguna e-court Pengadilan Negeri Fakfak

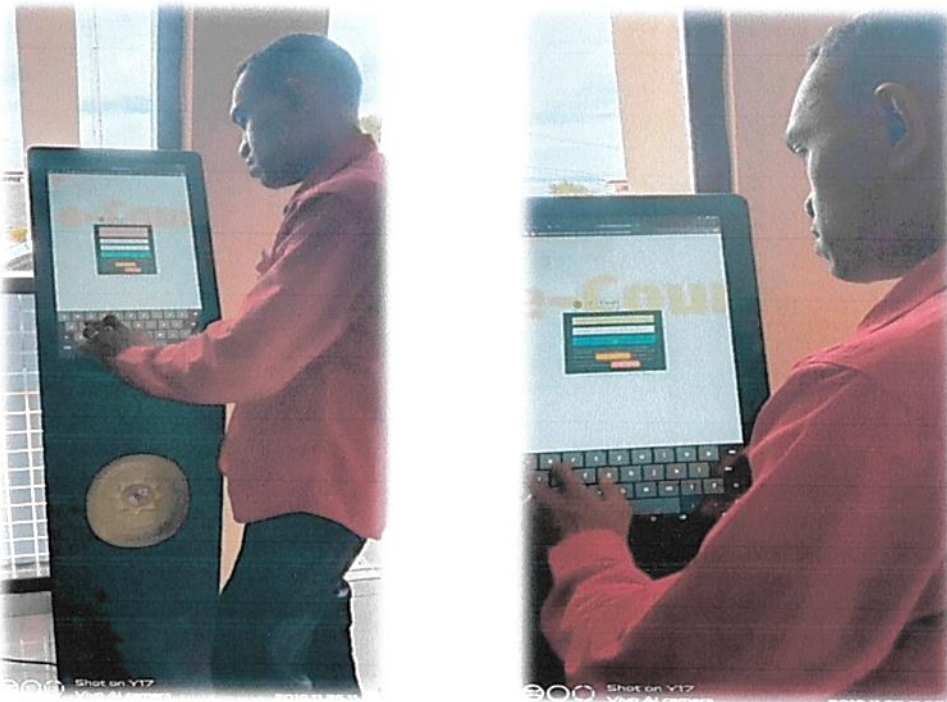
No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN FFK-11202116V 27 November 2021	Sudah Dibayar (Kartirnas: Otonans)	Perkara Tendaftar	Rp. 892 000	15/Pdt.G-2021/PN Ffk 1 Desember 2021
2	PN FFK-11202116W 9 November 2021	Sudah Dibayar (Kartirnas: Otonans)	Perkara Tendaftar	Rp. 392 000	14/Pdt.G-2021/PN Ffk 9 November 2021
3	PN FFK-08202117YE 26 Agustus 2021	Sudah Dibayar (Kartirnas: Otonans)	Perkara Tendaftar	Rp. 392 000	13/Pdt.G-2021/PN Ffk 27 Agustus 2021
4	PN FFK-0720211MGR 30 Juli 2021	Sudah Dibayar (Kartirnas: Otonans)	Perkara Tendaftar	Rp. 392 000	11/Pdt.G-2021/PN Ffk 30 Juli 2021
5	PN FFK-07202112HE 28 Juli 2021	Sudah Dibayar (Kartirnas: Otonans)	Perkara Tendaftar - Putusan Tanggal Putusan: 25 Agustus 2021	Rp. 892 000	10/Pdt.G-2021/PN Ffk 29 Juli 2021
6	PN FFK-0720211RNO 2 Juli 2021	Sudah Dibayar (Kartirnas: Otonans)	Perkara Tendaftar - Putusan Tanggal Putusan: 17	Rp. 892 000	8/Pdt.G-2021/PN Ffk 6 Juli 2021

Tampilan Daftar Perkara Gugatan e-court Pengadilan Negeri Fakfak



Tampilan Detail Pendaftaran/dokumen Persidangan e-court Pengadilan Negeri Fakfak

❖ Implementasi Layanan e-court corner



Tampilan salah satu Advokat yang menggunakan perangkat baru layanan e-court corner Pengadilan Negeri Fakfak

❖ Implementasi Pengenalan ecourt pada pengunjung pengadilan



Menampilkan video pengenalan dan penjelasan tentang e-court di ruang tunggu Pengadilan Negeri Fakfak

2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Fakfak

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

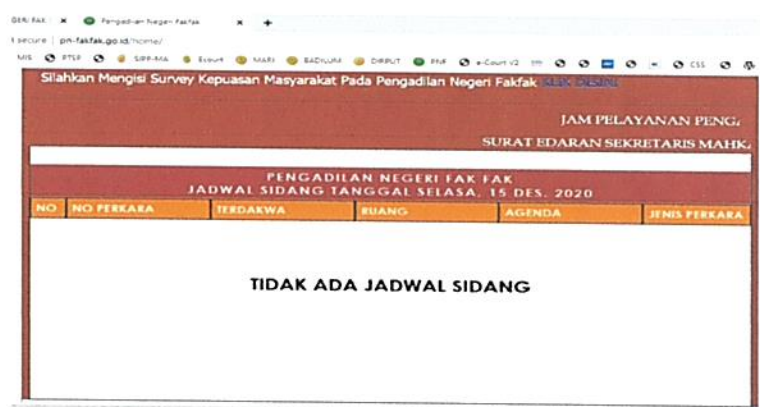
Aplikasi SIPP ini secara terus menerus disempurnakan, dimana aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu **versi 4.1.1** Perangkat teknologi informasi dan alat pengolah data untuk mendukung pengoperasian aplikasi SIPP di Pengadilan Negeri Fakfak yaitu :

Tabel IV.7 Perangkat pendukung SIPP

Perangkat Pendukung SIPP			
Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server	Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb	1	Unit
	2x 4GB DR3-1600 ECC		
	Independent Mode Installation		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	2x 300GB SAS ^G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
Aplikasi SIPP	Versi 4.1.1	1	Aplikasi

Pengadilan Negeri Fakfak memiliki Website dengan alamat :www.pn-fakfak.go.id dalam halaman website tersebut ditampilkan informasi-informasi terkait Pengadilan Negeri Fakfak sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan Informasi kepada pencari informasi tanpa harus datang langsung. Untuk penelusuran Perkara / pencarian informasi perkara yang berlangsung di Pengadilan Negeri Fakfak, masyarakat juga dapat mengaksesnya pada website Pengadilan Negeri Fakfak, melalui Menu INFO PERKARA, sedangkan untuk mencari Jadwal sidang pada Menu JADWAL SIDANG.

Berikut tampilan-tampilan Menu pada Website dan Implementasi SIPP di Website Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan Menu Jadwal Sidang Online pada Website Pengadilan Negeri Fakfak

5

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dimulai dari Tahun 2016, Pengadilan Negeri Fakfak Klas II mencoba melakukan perubahan pola pikir aparatur dalam bidang Standar Pelayanan Publik dan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Fakfak. Perubahan baik didalam dan luar gedung Pengadilan Negeri Fakfak dan inovasi-inovasi pelayanan publik direncanakan dan dilakukan. Seiring dengan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Fakfak untuk mendukung visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama dalam hal mutu pelayanan pengadilan.

Dengan sangat membanggakan Pengadilan Negeri Fakfak berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat "A" (Excellent) dari Dirjen Badan Peradilan Umum, dengan Nomor: TAPM.157/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 yang diserahkan pada Tanggal 29 November 2017 di Makassar. Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, motivasi dan memicu semangat kerja aparatur untuk dapat mempertahankan standar pelayanan publik dan meningkatnya lebih lagi dimasa depan baik dalam hal layanan publik dan kinerja aparatur yang ada didalamnya.



Foto Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Fakfak



Foto Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Fakfak, di Makassar, 29 November 2017

Dan sebagai Evaluasi dari Akreditasi Pengadilan Negeri Fakfak, telah dilakukan **Assesment Surveillance yang pertama** pada tanggal 23 – 25 Oktober 2018 oleh Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Jayapura.



Dan Evaluasi dari Akreditasi Pengadilan Negeri Fakfak, telah dilakukan **Assesment Surveillance yang kedua** pada tanggal 25 – 27 November 2019 oleh Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Jayapura.



Dan Evaluasi dari Akreditasi Pengadilan Negeri Fakfak, telah dilakukan **Assesment Surveillance yang ketiga** pada tanggal 17 – 19 Maret 2020 oleh Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Jayapura.





Dan Evaluasi dari Akreditasi Pengadilan Negeri Fakfak, telah dilakukan **Assesment Surveillance yang keempat** pada tanggal 16 – 18 Juni 2021 oleh Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Jayapura.

2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

A. Historis dan Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Fakfak

Pengadilan Negeri Fakfak (selanjutnya disebut PN Fakfak) sebagai salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Secara ideal, sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran Visi PN Fakfak, yakni “Terwujudnya Pengadilan Negeri Fakfak Yang Agung”, dan dalam upaya mencapai visi tersebut telah ditetapkan Misi PN Fakfak yang sinergi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja melalui Akreditasi Penjaminan Mutu dan pembentukan 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi (RB).

PN Fakfak sangat menjunjung tinggi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Maksud dari asas tersebut adalah memberikan suatu pelayanan bagi pencari keadilan baik itu dari segi pelayanan hukum maupun dari segi pelayanan publik. Dalam upaya untuk mencapai Visi,

Misi dan pelayanan publik yang nyaman, transparan dan cepat sebagaimana dorongan Akreditasi Penjaminan Mutu dan bagian dari area pelayanan publik pada Reformasi Birokrasi, PN Fakfak telah berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan, dari sistem layanan Loker Terpadu pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan per periode Tahun 2017, yang telah diaudit Kinerja dan Integritas oleh Badan Pengawasan MA RI pada awal Oktober 2017 dan telah pula diaudit Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Auditor TAPM Badilum MA RI dengan hasil 'A *Excellent*', Loker Pelayanan Terpadu yang dibuat PN Fakfak pada dasarnya sama dengan konsep PTSP, akan tetapi sesuai arahan pimpinan Auditor dan memperhatikan arahan Dirjen Badilum MA RI untuk mengupayakan seluruh satker peradilan umum untuk membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka PN Fakfak telah mendukung kebijakan tersebut, sehingga berupaya keras memindahkan konsep loker terpadu yang telah ada menjadi meja layanan terpadu dalam bentuk *One Gate Integrated Service* atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut dengan PTSP).

Sebagaimana digariskan dalam konsep pelayanan terpadu sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, PTSP bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses pelayanan pengadilan melalui satu pintu, dan memangkas birokrasi pelayanan yang begitu panjang dan berbelit-belit. Selain itu PN Fakfak memandang PTSP dirancang untuk mengurangi interaksi langsung antara para aparaturnya Pengadilan dengan para pencari keadilan maupun pihak yang berkepentingan, serta memberikan pelayanan yang prima dan mengedepankan transparansi peradilan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga dapat mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Beberapa konten dan fasilitas PTSP yang telah disiapkan PN Fakfak pada saat peluncuran antara lain sesuai dengan perencanaan adalah sebagai berikut:

- ✓ Loker Layanan Terpadu yang saat ini masih berjalan, maupun PTSP PN Fakfak yang akan segera diluncurkan (*launching*) secara keseluruhan diawasi dengan kamera CCTV. Ini merupakan salah satu dari sekian ruangan PN Fakfak yang diawasi oleh CCTV, sehingga pelayanan PTSP termonitor dan

terekam sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepan serta mencegah praktek kecurangan dalam melayani publik.

- ✓ Untuk memberikan layanan kepada kaum disabilitas dan masyarakat lainnya yang tergolong prioritas (lansia, dan ibu hamil), PTSP PN Fakfak terhubung dengan akses disabilitas, dan prioritas layanan bagi (disabilitas, lansia, dan ibu hamil) beserta kursi ruang tunggu prioritasnya. Akses prioritas tersebut pada PTSP PN Fakfak terkoneksi dengan mudah dari Area Parkir, terhubung melalui akses jalan difabel menuju gedung PN Fakfak (Meja PTSP) hingga ruang sidang dan Toilet Khusus Difabel, dengan begitu mudah dan nyaman.
- ✓ Untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan, PTSP PN Fakfak juga menyediakan minuman dingin dan/atau minuman biasa berupa air mineral, serta permen untuk setiap tamu / pengunjung.
- ✓ Untuk meningkatkan pengetahuan secara mandiri, dalam ruang PTSP telah disiapkan beberapa pamflet kecil yang bisa diambil pengunjung/tamu, berisikan konten-konten inovasi, informasi dan layanan PN Fakfak2 termasuk didalamnya upaya PN Fakfak dalam membangun akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai tindakan konkrit atas misi PN Fakfak dalam bentuk pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- ✓ Adanya 2 (dua) layar TV LED flat dengan kualitas 4K 50 inch, yaitu 1 (satu) layar TV menampilkan jadwal sidang, dan 1 (satu) layar TV akan menampilkan informasi terkini (*update*) dan himbauan kepada masyarakat yang bersifat mendidik dan kesadaran hukum.
- ✓ Untuk memudahkan PN Fakfak mengevaluasi pelayanan, kinerja serta sarana prasarana, pada Meja PTSP disiapkan kuesioner manual, dan kedepan akan disiapkan kuesioner secara elektronik yang lebih mudah dan cepat sehingga akumulasi data dapat diolah.
- ✓ Dalam upaya memitigasi resiko kebakaran dan orang sakit mendadak, PTSP pada Meja Layanan Informasi dilengkapi alat pemadam kebakaran (APAR) dan kursi roda serta Kotak P3K, yang mana seluruh personil telah diberikan

pelatihan menghadapi bencana alam, huru hara, pertolongan pertama atas kecelakaan, dan kebakaran.



Konsep Perencanaan 3D

Meja Layanan Kepaniteraan (Panmud Pidana, Perdata, dan Hukum) dan Meja Layanan Kesekretariatan (Bagian Umum dan Keuangan)

Namun demikian, tidak berarti pelayanan yang mengedepankan eksekusi dan transparansi tidak berjalan, dan para pencari keadilan tidak dapat memasuki ruangan kepaniteraan maupun kesekretariatan tanpa seizin dari pimpinan masing-masing bagian tersebut, Karena area tersebut merupakan Area Terbatas (*Restricted Public Area*), sebagaimana Ketua PN Fakfak telah menetapkan dalam SK Ketua perihal 3 (tiga) zona pada area PN Fakfak, yaitu Zona Publik, Zona Terbatas (*Restricted Public Area*), dan Area Terorisasi (*Authorized Person Only*).



Desain kaca grafir yang mengedepankan kearifan lokal yang ditempatkan pada area sisi kanan dan sisi kiri PTSP. Adapun gambar sisi kanan mendeskripsikan bahwa PN fakfak berada diatas tanah Papua dengan kemilau emas, hutan, burung cenderawasih, buah pala dan pala serta tifa khas Fakfak, sedangkan sisi kiri menggambarkan PN Fakfak yang berada di Provinsi Papua Barat memiliki ciri khas adanya burung kasuari, serta adanya tungku dengan tiga batu yang mengilustrasikan kondisi sosial masyarakat Fakfak dikenal dengan 'satu tungku tiga batu', yaitu kerukunan umat beragama, serta kondisi geografis Kabupaten Fakfak yang meliputi bentangan bukit-bukit dan laut yang indah beserta kapal nelayan.



Foto PTSP PN Fakfak pada masa pandemi Covid-19, menggunakan pengaman pembatas

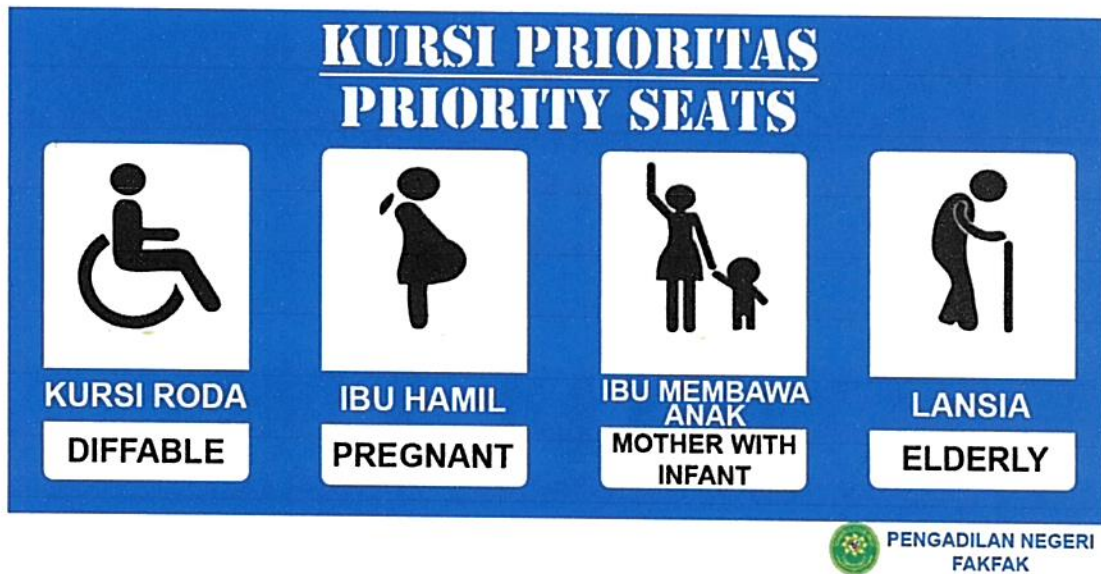
❖ Akses Menuju PTSP (Layanan Prioritas)



Parking lot khusus Prioritas (Difabel, Lansia dan Ibu Hamil) dan jalur khusus



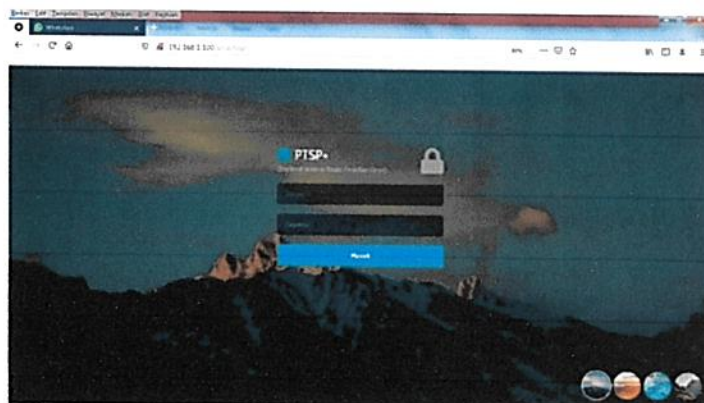
(wheel chair line) serta dilengkapi jalur akses petunjuk bagi kaum buta menuju PTSP



Kursi khusus Prioritas dalam Ruang Tunggu PTSP PN Fakfak

❖ Aplikasi PTSP

Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Fakfak telah digunakan Aplikasi untuk sebagai inovasi dan bentuk pelayanan publik yang efisien, cepat dan terpadu. Aplikasi PTSP merupakan Aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. yang dapat dimonitoring secara keseluruhan untuk surat masuk keluar, Buku Tamu, Surat keterangan Online, dll.



Tampilan Login Aplikasi PTSP

a. Buku Tamu

Pada Tahun 2021, Pengunjung Pengadilan yang menggunakan Layanan Pengadilan dan tercatat pada Aplikasi PTSP menu Register Buku tamu berjumlah **942 Orang Tamu**.

#	Tanggal	Nama Tamu	Alamat	No. Telp	Keperluan
1	27/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	082211111	Pengunjung persentase pengantar perkara ke pers
2	27/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	082211111	Pengunjung persentase persentase perkara ke pers
3	27/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	082211111	Berhenti jaga persentase persentase perkara ke pers
4	22/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	082211111	Persentase persentase persentase perkara ke pers
5	22/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	082211111	Persentase persentase persentase perkara ke pers
6	22/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	082211111	Persentase persentase persentase perkara ke pers
7	22/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	082211111	Persentase persentase persentase perkara ke pers
8	22/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	082211111	Persentase persentase persentase perkara ke pers

b. Surat Masuk

Pada Tahun 2021, Surat Masuk dalam Layanan Pengadilan dan tercatat pada Aplikasi PTSP menu Register surat masuk berjumlah **520 Surat Masuk**

#	Tanggal Surat	Nama Surat	Alamat	Program	Status	Revisi
1	26/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	Keperluan	Admission (Bk) 10/10/2021 Sak (Pinta/Pontianak)	8 Mar
2	26/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	Keperluan	Admission (Bk) 10/10/2021 Sak (Pinta/Pontianak)	7 Mar
3	26/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	Keperluan	Admission (Bk) 10/10/2021 Sak (Pinta/Pontianak)	12 Mar
4	26/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	Keperluan	Admission (Bk) 10/10/2021 Sak (Pinta/Pontianak)	11 Mar
5	26/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	Keperluan	Admission (Bk) 10/10/2021 Sak (Pinta/Pontianak)	11 Mar
6	26/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	Keperluan	Admission (Bk) 10/10/2021 Sak (Pinta/Pontianak)	11 Mar
7	26/10/21	RIKA ZULIA	Ngaswan Terpadu, Sak. Pinta, Kabupaten Muja/Pontianak	Keperluan	Admission (Bk) 10/10/2021 Sak (Pinta/Pontianak)	11 Mar

c. Surat Keterangan Online

Pada Tahun 2021, pengguna Layanan eraterangsurat keterangan online dan tercatat pada Aplikasi PTSP menu Register surat keterangan berjumlah **275 Surat/Pemohon**.

No	Tanggal Register	Nama Register	Jenis Pemohonan	Peminat	Identitas
1	23/12/21	YUSUF M H Q 22019416	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Musa Yigitara	Kartu Tanda Nasional (KTP) 40300810262000
2	23/12/21	ABUSALAM U 22019416	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Muhammad Husain Basri	Kartu Tanda Nasional (KTP) 40302203890000
3	23/12/21	ABUSALAM U 22019416	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Muhammad Husain Basri	Kartu Tanda Nasional (KTP) 40302203890000
4	23/12/21	ABUSALAM U 22019416	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	MUHAMMAD QADRY NOORNINGGO	Kartu Tanda Nasional (KTP) 40302204040000
5	23/12/21	ABUSALAM U 22019416	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	MUHAMMAD QADRY NOORNINGGO	Kartu Tanda Nasional (KTP) 40302204040000
6	23/12/21	ABUSALAM U 22019416	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Kaidi E s mawan	Kartu Tanda Nasional (KTP) 40302204040000
7	23/12/21	ABUSALAM U 22019416	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Kaidi E s mawan	Kartu Tanda Nasional (KTP) 40302204040000

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. MEJA INFORMASI

1. *Sarana dan Prasarana meja pelayanan meja informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.*

Meja informasi merupakan garda depan pelayanan suatu Pengadilan, Pelayanan di meja informasi akan sangat menentukan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Meja informasi Pengadilan Negeri Fakfak saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan menggunakan Aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meja informasi Pengadilan Negeri Fakfak terdapat satu buah laptop untuk mendukung penginputan pemohon informasi dan data tamu, dua buku agenda untuk data pemohon informasi dan data tamu Pengadilan.



Bagi pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Fakfak untuk mendapat informasi, akan diarahkan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu kemudian petugas meja informasi akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Dan pada lobi Pengadilan Negeri Fakfak juga sudah dilengkapi dengan TV media center yang menampilkan tentang agenda persidangan hari ini, juga menampilkan video-video pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak.



Foto Meja Informasi PN Fakfak pada masa pandemi Covid-19, menggunakan pengaman pembatas

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik adalah meja pelayanan informasi publik yang terdiri dari :

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Meja Informasi	1 Unit	Baik
2.	Kursi	2 Unit	Baik
2.	Laptop	1 Unit	Baik

2. Sumber Daya Manusia.

Dalam pengelolaan meja informasi, sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : W30-U6/108/KPN/SK/VII/2021 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ditunjuk beberapa nama, yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Kewenangan
1.	Ratna Keley, A.Md	Honoror	Petugas Meja Umum
2.	Robertho Tawirasaru, SH	Honoror	Petugas Meja Pidana
3.	Windi Yunitasari, SH	Honoror	Petugas Meja Hukum
4.	Yeni Anggraini, S.Sos	Honoror	Petugas Meja Perdata
5.	Juniar Patimbang, A.Md	Honoror	Petugas Meja Informasi

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Fakfak dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Fakfak.

4. Data Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2021, Pengunjung Pengadilan Negeri Fakfak yang menggunakan Pelayanan Informasi Publik adalah **794 Orang/Pengunjung**.

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	686	15 menit	686	-	-	-	-	-
Kepegawaian	19	15 menit	19	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	0	-	0	-	-	-	-	-
Anggaran & Asset	20	15 menit	20	-	-	-	-	-
Lainnya	69	15 menit	69	-	-	-	-	-
TOTAL	794		794	-	-	-	-	-

5. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2021 NIHIL.

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Data Pelayanan Pengaduan

Data Pelayanan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021 NIHIL.

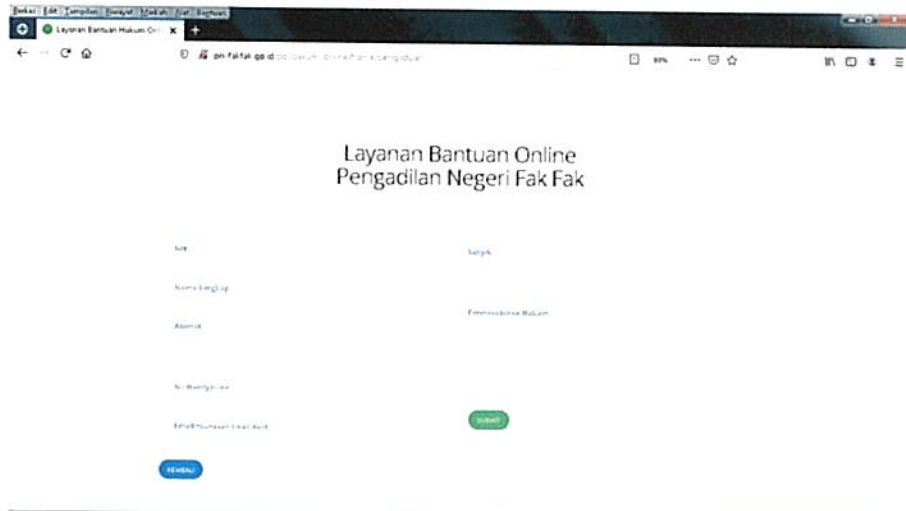
NO.	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	PENYALURAN	PEMERIKSA	PROSES PENANGANAN TERAKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

B. POSBAKUM ONLINE

Dan sebagai inovasi, Pengadilan Negeri Fakfak menampilkan Layanan Pos Bantuan Hukum Online yang dapat diakses melalui website pn-fakfak.go.id, yang merupakan hasil Aktualisasi dan Habitiasi dari Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan Inovasi Layanan POSBAKUM Online pada Website Pengadilan Negeri Fakfak



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Layanan Bantuan Online Pengadilan Negeri Fak Fak' page. The page has a white background with a blue header. Below the header, there are several input fields for user information: 'No', 'Nama Lengkap', 'Alamat', 'No. Handphone', and 'Email/No. Email Lain'. To the right of these fields, there is a 'Lupa?' link and a 'Pembayaran Bantuan' section. At the bottom left, there is a blue 'Masuk' button. At the bottom right, there is a green 'Daftar' button.

Tampilan Pengisian Form POSBAKUM Online

C. E-RATERANG

Eraterang merupakan salah satu inovasi media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Fakfak. Inovasi ini telah diterapkan di Pengadilan Negeri Fakfak sejak 1 Juli 2019, sebagai salah satu wujud pelayanan publik yang efisien. Inovasi pelayanan publik ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan eraterang pada website Pengadilan Negeri Fakfak



Disediakannya Banner promosi tentang layanan eraterang pada pintu masuk Pengadilan Negeri Fakfak

D. VISUALISASI BERUPA VIDEO UNTUK E-COURT, GRATIFIKASI

Sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengunjung pengadilan, Pengadilan Negeri Fakfak juga menggunakan inovasi dalam peningkatan pelayanan baik penyampaian informasi mengenai e-court dan gratifikasi dalam bentuk tampilan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh pengunjung pengadilan berupa video yang ditampilkan pada TV diarea-area yang bersentuhan dengan pengunjung pengadilan.





Tampilan Profil E-Court pada LCD Loby Pengadilan Negeri Fakfak



Tampilan Pojok e-court pada masa pandemi Covid-19, menggunakan pengaman pembatas

6

BAB VI **PENGAWASAN**

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Aparatur Negara, maka Pengawasan Internal sebagai pengendalian harus terus menerus dilakukan oleh Atasan Langsung terhadap bawahan secara preventif maupun represif agar dalam pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Pengawasan Atasan Langsung ini paling potensi karena jarak antara obyek dengan subyek pengawasan berjarak dekat sehingga setiap gejala ketimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat terlihat. Dengan demikian tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih dini dan lebih cepat.

Bentuk Pengawasan ada dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan penilaian atas laporan atau isi dokumen.

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
- c. Pengawasan terhadap Penanganan Pengaduan yang meliputi pengawasan terhadap tingkah laku Aparat Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Tahun 2021, Pengadilan Negeri Fakfak, melakukan Pengawasan Rutin oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulannya pada masing-masing Bagian.

a. Pengawasan Bagian Kesekretariatan



Pengawasan Langsung dari Sekretaris



Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pada Bidang Umum dan keuangan, Kepegawaian , Organisasi dan Tatalaksana serta Perencanaan, TI dan Pelaporan

b. Pengawasan Bagian Kepaniteraan



Pengawasan Langsung dari Panitera kepada Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Pidana



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Hukum



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Perdata



Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu

c. Pengawasan Hakim Wasmat





Pengawasan oleh Hakim Wasmat ke Lembaga Pemasyarakatan Fakfak Klas II

B. EVALUASI

Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Fakfak dilakukan dengan tujuan untuk memonitor dan mengawasi semua kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Diharapkan agar kekurangan atau kesalahan yang ada dapat ditanggulangi dengan cepat.

Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2021 telah melakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan :

1. Melaksanakan rapat pengawasan setiap bulan dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Fakfak;
2. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing – masing bidang sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.

7

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan tugas dengan baik selama tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, serta dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
- ✓ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Fakfak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik
- ✓ Berupaya untuk semakin meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Fakfak mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

B. Rekomendasi.

1. Sehubungan dengan adanya aksi anarkis stakhoder (dalam hal ini pengunjung sidang) yang kadang-kadang mengakibatkan kerusakan pada Gedung Pengadilan, maka seyogyanya perlu dilakukannya program penyuluhan hukum kepada masyarakat bersama dengan aparat penegak

hukum lainnya pada waktu mendatang dan dimohonkan agar mendapatkan perhatian dari para pejabat pelaksana terkait. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir aksi anarkis dan sekaligus mempertinggi pemahaman masyarakat tentang hukum dan entitasnya. Kontribusi dana merupakan hal yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari program peyuluhan hukum tersebut.

2. Jika ada penempatan CPNS lagi mohon diperhatikan tempat tinggal CPNS tersebut, karena jika dilihat dari data kepegawaian Pengadilan Fakfak CPNS yang berasal Daerah Jayapura pada saat telah diangkat menjadi PNS akan mengajukan permohonan pindah ke Pengadilan Tinggi Jayapura dengan alasan kepentingan keluarga, dengan demikian pengisian formasi yang ada menjadi kosong lagi, mengingat pula ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Fakfak mendekati usia pensiun.
3. Pemberdayaan sumber daya manusia Yudisial maupun non Yudisial sangat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan terpusat mengingat selalu ada perubahan-perubahan mendasar yang secara signifikan mempengaruhi kinerja dan harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan akuntabel serta terkait pula dengan penataan dan pengelolaan pelaporan tingkat satuan kerja yang harus dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik dan benar.
4. Salah satu faktor kepindahan Pegawai PN. Fakfak ke PN lain adalah terbatasnya sarana penunjang berupa mess untuk Pegawai. Untuk itu harus mendapat perhatian dari Mahkamah Agung, karena mengingat pegawai PN Fakfak yang berasal dari luar Daerah tinggal di rumah kontrakan, yang apabila dibandingkan dengan pendapatan dan kemahalan pada Kabupaten Fakfak sangat tidak berimbang (pendapatan kecil, tingkat kemahalan tinggi).
5. Seiring dengan tuntutan sebagai pegawai negeri sipil yang erat kegiatannya dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, maka seyogyanya perlu diberikan dengan pelatihan-pelatihan pada waktu

mendatang. Oleh karena keadaan yang sering terjadi dalam penyelesaian pekerjaan adalah dilakukan sendiri dan/atau belajar dari pihak lain diluar instansi internal (otodidak).